

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MANGGARAI**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa, Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dan Bidang Pembangunan Desa serta Kesekretariatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Laporan ini tidak hanya memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai, tetapi juga memuat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa target berhasil dilampaui, namun dilain pihak beberapa target belum dapat dipenuhi karena berbagai faktor yang berada di luar kendali DPMD Kabupaten Manggarai. Namun demikian, secara umum berbagai target strategis yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan selama Tahun 2021.

Kami memandang bahwa pencapaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari upaya team work yang bekerja keras, bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan DPMD Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus ditingkatkan, dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikan. Dengan cara seperti ini, DPMD Kabupaten Manggarai menjadi Perangkat Daerah yang secara terus menerus melakukan perbaikan, dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk perbaikan kinerja berkelanjutan dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja kami di tahun berikutnya.

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar</b> .....	
<b>Daftar Isi</b> .....	
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	
C. Struktur Organisasi .....	
D. Sistematika Penyajian.....	
<b>Bab II Perencanaan Kinerja</b> .....	
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 .....	
B. Indikator Kinerja Utama .....	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b> .....	
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	
B. Analisis Capaian Kinerja .....	
C. Realisasi Keuangan .....	
<b>Bab IV Penutup</b> .....	
Lampiran :	
1. Matriks Renstra .....	
2. IKU.....	
3. RKT .....	
4. PK .....	
5. Pengukuran Kinerja .....	

## RINGKASAN EXECUTIVE

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap kinerja instansi pemerintah diukur sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja selama 1 tahun. Pada Tahun 2020, DPMD Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 5 Indikator Kinerja dan 2 Sasaran Strategis yang tertuang dalam 7 Program dan 28 Kegiatan. Seluruh kegiatan/program tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai sasaran. Dengan kata lain seluruh kegiatan/program yang telah direncanakan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perencanaan Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 sasaran dan indikator yang telah ditetapkan adalah **91,45 %**, dengan Kategori “MEMUASKAN”. Pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut :

No	Sasaran	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	96,1 %
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif	86,90 %
<b>Rata- Rata</b>		<b>91, 45 %</b>
<b>Kategori</b>		<b>Memuaskan</b>

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai.
2. Keikutsertaan masyarakat yang optimal dalam memperlancar segala kegiatan.
3. Kepastian dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.
4. Kepastian waktu pelaksanaan kegiatan yang tepat.
5. Kesiapan Aparatur yang optimal dalam menjalankan tugas walaupun ada beberapa jabatan yang lowong.
6. Koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi kegiatan yang semakin baik.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna mempertahankan pencapaian kinerja sasaran yaitu :

1. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DPMD dan Perangkat Desa.
2. Mendorong desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan peran lembaga masyarakat di Desa maupun di Kecamatan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan aparatur desa.
5. Mendorong desa agar tepat waktu menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan keuangan.
6. Meningkatkan koordinasi kerja dan kerjasama dengan TP-PKK Kabupaten dalam tata kelola kegiatan dan keuangan.

Secara keseluruhan DPMD Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan langsung seluruh program dan kegiatannya sebesar **Rp.1.586.199.471.-** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp.1.385.243.466 (87,33%)**. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pendukung 2 Sasaran Strategis sebesar **Rp.1.301.765.900,00**. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap program/kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi pengeluaran keuangan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yaitu sebesar **Rp.1.170.220.640.-00** dari total dana belanja langsung program/kegiatan pendukung sasaran strategis yang dialokasikan dalam DPA DPMD Tahun Anggaran 2021.

Ruteng, Januari 2022  
Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai

**Drs. Yoseph Jehalut**  
Pembina Tk.I-IV/b  
Nip. 19651128 199402 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD Tahun 2020.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai melalui LAKIP ini akan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja OPD selama Tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2021, sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).

#### **1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Manggarai**

##### **1. Dasar Hukum Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Manggarai**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah bahwa kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai merupakan salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

##### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Manggarai**

Berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugasnya DPMD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3 Susunan Organisasi**

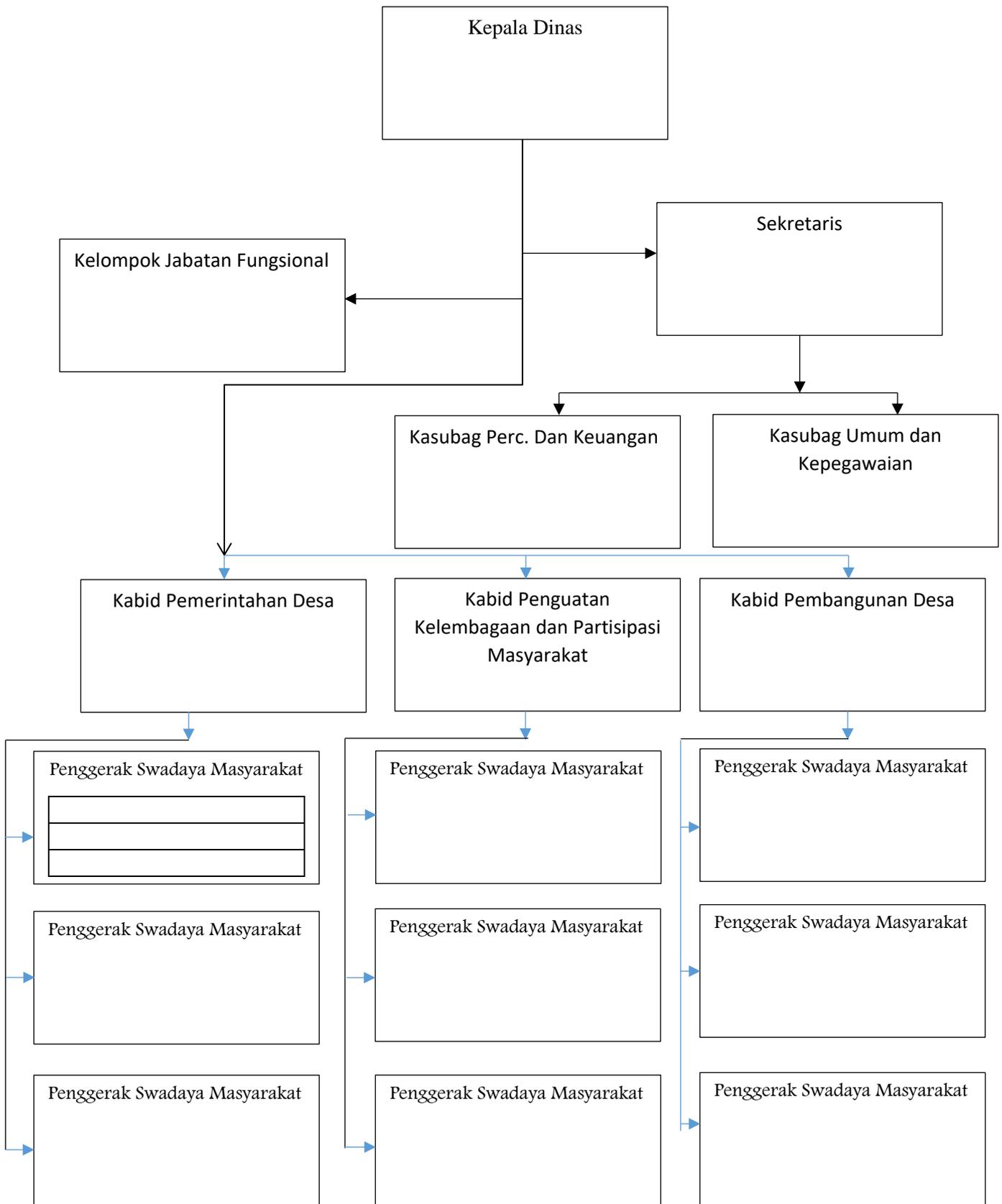
Organisasi DPMD Kabupaten Manggarai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan organisasi DPMD Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 2 Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi 3Seksi yaitu :
  - a. Seksi Penataan Desa;
  - b. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - c. Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa.
4. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahi 3 Seksi yaitu :
  - a. Seksi Penguatan Kelembagaan;
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat.
5. Bidang Pembangunan Desa, membawahi 3 Seksi yaitu :
  - a. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. Seksi Kerja Sama Antar Desa; dan
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa.
6. UPT Dinas; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

### KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021



Susunan kepegawaian dan perlengkapan DPMD Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan.

- S2 : 1 Org
- S1 : 9 Org
- Sarjana Muda : 3 Org
- SLTA : 9 Org
- SLTP : 1 Org

2. Berdasarkan Golongan

- Gol. IV : 3 Org
- Gol. III : 14 Org
- Gol. II : 6 Org

3. Berdasarkan Eselon

- Eselon. II : 1 Org
- Eselon. III : 4 Org
- Eselon. IV : 8 Org

4. Diklat Penjenjangan

- PIM . II : 1 Org
- PIM. III : 1 Org
- PIM. IV : 8 Org

5. Jenis Kelamin

- Laki-laki : 15 Org
- Perempuan : 7 Org

6. Jumlah Jabatan Struktural : 17 dan terisi 15, kurang 2 orang.

7. Tenaga Kontrak Daerah 1 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 2 orang yaitu :

- Adrianus Nagong
- Marselinus Reo Due, S.Pd,M.M
- Yuliana Indria Jehami, S.pd

Aset Modal ( sarana dan pra sarana perkantoran )

## DAFTAR PEGAWAI DINAS PMD TAHUN 2022

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Drs. Yoseph Jehalut	19651128 199402 1 002	Pembina Tk.I-IV/b	Kepala Dinas PMD
2	Ir.Lorens Jelamat	19651215199403 1 012	Pembina Tk.I – IV/b	Sekretaris DPMD
3	Jedaut Aloysius,SH.	19651231 200012 1 048	Pembina- IV/a	Kabid Pembangunan Desa
4	Agustinus E. Demo,S.STP	19800508 199912 1 001	Penata - III / c	Kabid Pemerintahan Desa
5	Tibortius Suhardi,S.Hut	19760414 201001 1 012	Penata Tk.I - III /d	Kabid Kelemb. & Partis. Masyarakat
6				
7	Ernestivonny O.Jemada,STP	19761122 200312 2 005	Penata TK.I- III /d	Penggerak Swadaya Masyarakat
8				
9				
10	Germana Ag. M. F. Basan,SE	19780308 200801 2 022	Penata TK.I- III /d	Penggerak Swadaya Masyarakat
11	Heribertus W. G., S,STP, m.Tr.IP	19851103200312 1001	Pembina –IV/a	Penggerak Swadaya Masyarakat
12	Fransiskus Magang	19670217 199103 1 008	Penata .Tk.I – III / d	Penggerak Swadaya Masyarakat
13	Clara Elisabeth Yudiana	19680917199303 2 013	Penata Tk.I – III /d	Kasubag Perenc & Keuangan
14	Saveriana I.Mutiara,SE	19771212 201001 2 004	Penata – III / c	Penggerak Swadaya Masyarakat
15	Yohanes Tan, SE	19790505 201001 1 041	Penata – III / c	Penggerak Swadaya Masyarakat
16	Servasius Iron, A.Md	19770513 200604 1 020	Penata - III / c	Penggerak Swadaya Masyarakat
17	Fransiskus Jen, S.Sos	19810612 201001 1 029	Penata Tk.I – III /d	S t a f
18	Ferdinandus Sensi, A.Md	19800301 200801 1 020	Penata Muda Tk. III / b	S t a f
19	Kanisius Tulus	19751231 199903 1 015	Penata Muda – III/ a	S t a f
20	Saverinus Hambur, A. Md	19810821 201101 1 014	Penata Muda – III/ a	Staf
21	Laurensius M.N. Waso,SE	19970721 202012 1 002	Penata Muda-III/a	S t a f
22	Felomena Imul	19680718 200701 2 026	Pengatur Tk.I - II / d	S t a f
23	Aloysius Jemaman	19670327 200701 1 016	Pengatur Tk.I - II / d	Staf
24	Stefanus Garus	19791001 200701 1 016	Pengatur Tk.I – II/d	S t a f
25	Adriana K. Tatic	19830708 201001 2 029	Pengatur II/ c	S t a f
26	Agustinus J. Parut	19800818 201001 1 006	Pengatur II/ c	Staf
27	Rosdiana K. Afra Kama	19810408 201406 2 001	Pengatur Muda II/b	Staf
28	Adrianus Nagong		Tenaga Kontrak	Staf
29	Marselinus Reo Due, S.Pd,M.M		THL	Staf
29	Yuliana Indria Jehami, S.Pd		THL	Staf

## DAFTAR JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON DINAS PMD TAHUN 2019

No	Nama Jabatan	Jumlah	Eselon	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	II B	Sudah terisi
2.	Sekretaris Dinas	1	III A	Sudah Terisi
3.	Kepala Bidang	3	III B	Sudah Terisi
4.	Kepala Seksi	8	IV A	1 Belum Terisi
5.	Kepala Sub Bagian	1	IV A	1 belum terisi
<b>J u m l a h</b>		<b>14</b>	<b>~</b>	

### 1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajiannya sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai Tahun 2021 meliputi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahun 2021

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

#### **Bab IV Penutup**

menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Secara ringkas substansi Renstra, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai dapat diilustrasikan sebagai berikut :

##### 1. Visi

Berdasarkan Visi Kabupaten Manggarai **“MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING“**, maka sesuai peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Manggarai yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati, maka dirumuskan Visi DPMD Kabupaten Manggarai di masa yang akan datang serta mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai dengan kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Manggarai, maka rumusan visinya yaitu:

**“ TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DESA”**

##### 2. Misi

Misi Dinas PMD Kabupaten Manggarai yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi di atas. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta penguatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di perdesaan untuk lima tahun mendatang yaitu :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan;
- Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat;

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan juga merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, DPMD Kabupaten Manggarai menetapkan Tujuan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

### 4. Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya DPMD Kab. Manggarai menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026. Disamping itu, DPMD Kabupaten Manggarai juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada DPMD Kabupaten Manggarai serta RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra DPMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama DPMD Kabupaten Manggarai yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021–2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan sbb:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1	<b>Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina:</b>
		1	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
		2	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan BPD
		3	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRK Desa
		4	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes
		5	Jumlah Aparat Pemdes yang mengikuti Rapat Evaluasi
		6	Jumlah Pejabat Kades yang dilantik
		2	<b>Jumlah Ranperda yang diusulkan</b>
		3	<b>Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya baik</b>
		4	<b>Jumlah Satker untuk Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa</b>
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif	1	<b>Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina</b>
		1	Jumlah Bumdes yang dibina
		2	<b>Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina:</b>
1	Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina		

		2	Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata.
		3	<b>Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina:</b>
		1	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan dana desa
		2	Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM
		3	Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi
		4	Jumlah Desa yang dimekarkan
		6	Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina
		7	Jumlah posyandu juara lomba starata

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas PMD Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

### SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1	<b>Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina:</b>	<b>290</b>
		1	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	-
		2	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan BPD	-
		3	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRRK Desa	145
		4	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes	145
		5	Jumlah Aparat Pemdes yang mengikuti Rapat Evaluasi	-
		6	Jumlah Penjabat Kades dan BPD yang dilantik	-
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif	2	<b>Pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa</b>	<b>1</b>
		3	<b>Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya baik</b>	<b>145</b>
		1	<b>Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina</b>	<b>58</b>
		1	Jumlah Bumdes yang dibina	58
		2	<b>Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina:</b>	<b>31</b>
	1	Jumlah Pokjantal Posyandu yang dibina	20	
	2	Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata	11	

		<b>3</b>	<b>Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina:</b>	<b>395</b>
		1	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan dana desa	145
		2	Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM	-
		3	Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi	184
		4	Jumlah Desa yang dimekarkan	52
		5	Jumlah pengurus Bumdes yang telah mendapat pelatihan	-
		6	Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina	11
		7	Jumlah posyandu juara lomba strata	3

**PROGRAM DAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET.</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	250.550.571.-	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.133.000.-	APBD
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.000.000.-	APBD
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	118.592.000.-	APBD
5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	91.085.700.-	APBD
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	755.090.200.-	APBD
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	337.748.000.-	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>1.586.199.471</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Manggarai adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja DPMD Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan /kendala dan permasalahan.

#### **3.1 URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Untuk mengukur kinerja kegiatan DPMD Kabupaten Manggarai secara menyeluruh diperlukan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (Input) yaitu segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran seperti Dana, SDM, Informasi, Kebijaksanaan/Peraturan Perundang-undangan, waktu teknologi dll.
2. Indikator Keluaran (Output) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dicapai dari sesuatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Indikator Hasil (Outcome) yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan 3 indikator yang telah diuraikan di atas. Pengukuran ini dengan menggunakan/memanfaatkan data kinerja, untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Pengumpulan data kinerja DPMD dilakukan dengan menyebarkan format Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan Dan Pengukuran Pencapaian Sasaran kepada setiap kegiatan.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2021 untuk mencapai 2 sasaran strategis.

### 3.2 ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 tercermin dalam pencapaian 2 sasaran strategis yaitu: 1). Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan 2). Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif. Pencapaian 2 sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 program utama dan 3 program penunjang. Program utama Dinas PMD dicapai melalui pelaksanaan 14 kegiatan. Pencapaian Kinerja seluruh Sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### A. Sasaran I : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja sasaran ini didukung oleh capaian kinerja 3 sub indikator pada 4 (empat) kegiatan dengan capaian masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

#### Evaluasi Pencapaian Sasaran: *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016-2021	Tahun 2016-2019		Capaian Kinerja s/d Tahun 2019 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina	Desa	145	145	145	100	290	290	100
1	Jlh desa yang melaksanakan pilkades dan BPD	Desa	145	42	42	100	-	-	-
2	Jlh desa yg difasilitasi penyusunan APBDes dan RRKDes	Desa	145	145	145	100	145	145	100
3	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRK Desa	Desa	145	145	145	100	145	145	100
2	Jumlah Ranperda yang diusulkan	Ranperda	8	5	5	100	-	-	-
3	Jumlah desa yang mengelola administrasi secara baik	Desa	145	145	145	100	145	145	100
4	Jumlah Satker Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa	Satker	-	1	1	100	1	1	100
<b>Rata-rata</b>					<b>100</b>			<b>100,00</b>	
<b>Kategori</b>					<b>Memuaskan</b>			<b>Memuaskan</b>	

#### INDIKTOR KINERJA SASARAN I: JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI DAN DIBINA

Fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan urusan wajib Dinas PMD. Kinerja pada indikator ini merupakan output pelaksanaan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1). *Fasilitasi Pemilihan Kepala desa dan BPD*; 2). *Fasilitasi Penyusunan APBDes dan RRKDesa*; 3). *Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa*; dan 4). *Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*.

Secara umum indikator kinerja sasaran ini tergolong dalam katagori *memuaskan* karena dilaksanakan tuntas 100% dengan desa yang difasilitasi dan dibina sebanyak 145 Desa.

Berikut penjelasan tentang indikator capaian kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa :

**a. Sub 1 Indikator Kinerja 1: Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pemilihan Kepala Desa dan BPD.**

Pergantian Kepala Desa dan BPD dilaksanakan setiap 6 tahun sekali kecuali karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Di Kabupaten Manggarai pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang. Gelombang Pertama tahun 2016 sebanyak 42 desa, gelombang kedua tahun 2018 sebanyak 10 desa, gelombang ketiga rencananya akan dilakukan secara serentak pada tahun 2020 sebanyak 94 desa, tetapi karena Kabupaten Manggarai melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan situasi pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaannya di tunda. Dan pada tahun 2020 hanya melaksanakan Pemilihan / pengisian keanggotaan BPD sebanyak 12 Desa, dengan rinciannya pada tabel dibawah ini :

**DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN BPD TAHUN 2020**

No.	Kecamatan	Desa		Ket.
1	Ruteng	1	Bulan	
		2	Pong Lale	
2	Rahong Utara	3	Benteng Tubi	
		4	Bangka Ruang	
3.	Satar Mese Barat	5	Golo RopongBuar	
		6	Cambir Leca	
		7	Wongka	
4.	Satar Mese	8	Ulu Belang	
5.	Wae Rii	9	Benteng Poco	PAW
6.	Cibal	10	Nenu	PAW
7.	Wae Rii	11	Wae Renca	
8.	Satar Mese Utara	12	Mata Wae	

Untuk 22 desa persiapan yang pembentukannya di atur dalam Peraturan Bupati Manggarai nomor 61 tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam wilayah Kabupaten Manggarai telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluasi dari Dinas PMD Propinsi Nussa Tenggara Timur yang didampingi oleh Dinas Kabupaten Manggarai dan Kecamatan. Adapun desa – desa yang dievaluasi dan diverifikasi adalah sebagai berikut :

**DAFTAR NAMA 22 DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2020**

NO	KEC.	NO	DESA INDUK	DESA PERSIAPAN	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	SATAR MESE BARAT	1	Pemekaran dari Desa Terong	Bea Terong	Laporan Lengkap
		2	Pemekaran dari Desa Cambir Leca	Lereng	Laporan Lengkap
		3	Pemekaran dari Desa Satar Luju	Luju Mas	Laporan Lengkap
2.	SATAR MESE	1	Pemekaran dari Desa Pongkor	Ulu ngali	Laporan Lengkap
3.	CIBAL	1	Pemekaran dari Desa Welu	Lura	Laporan Lengkap
		2	Pemekaran dari Desa Nenu	Benteng Todo	Laporan Lengkap
		3	Pemekaran dari Desa Ladur	Liang Tongkeng	Laporan Lengkap
4.	REOK	1	Pemekaran dari Desa Ruis	Ruis Timur	Laporan Lengkap
5.	WAE RII	1	Pemekaran dari Desa Golo Cador	Golo Ling	Laporan Lengkap
		2	Pemekaran dari Desa Wae Rii	Bangka Wade	Laporan Lengkap
6	RAHUT	1	Pemekaran dari Desa Buar	Compang Ntala	Laporan Lengkap
		2	Pemekaran dari Desa Tengku Lese	Cunca Lega	Laporan Lengkap
		3	Pemekaran dari Desa Pong Lengor	Bangka Putuk	Laporan Lengkap
		4	Pemekaran dari Desa Golo Langkok	Golo Wangko	Laporan Lengkap
7	LELAK	1	Pemekaran dari Desa Urang	Redo	Laporan Lengkap
		2	Pemekaran dari Desa Bangka Lelak	Wae nanga	Laporan Lengkap
8	RUTENG	1	Pemekaran dari Desa Bulan	Bung	Laporan Lengkap
		2	Pemekaran dari Desa Golo Worok	Bangka Wela	Laporan Lengkap
9	CIBAL BARAT	1	Pemekaran dari Desa Bere	Compang Bere	Laporan Lengkap
		2	Pemekaran dari Desa Wae Codi	Golo Taas	Laporan Lengkap
		3	Pemekaran dari Desa Timbu	Golo Lada	Laporan Lengkap
10	Reok Barat	1	Pemekaran dari Desa Loce	Benteng Loce	Laporan Lengkap

Jumlah Aparatur Desa di Kabupaten Manggarai tahun 2020 sebagai berikut :

**1. Aparatur Desa :**

- 1). Jumlah Kepala Desa
 

Laki – laki	: 53 orang
Perempuan	: 2 orang
<b>Jumlah:</b>	<b>55 orang</b>
  
- 2). Jumlah Penjabat Kepala Desa
 

Laki – Laki	: 89 orang
Perempuan	: 1 orang
<b>Jumlah:</b>	<b>90 orang</b>
  
- 3). Tingkat Pendidikan Kades/Penjabat Sarjana : 10 orang
 

Diploma	: 4 orang
SLTA/seder	: 131 orang
SLTP/seder	: - orang
<b>Jumlah:</b>	<b>145 orang</b>
  
- 4). Tingkat Pendidikan Kaur
 

Sarjana	: 17 orang
Diploma	: - orang
SLTA/seder	: 345 orang
SLTP/seder	: 67 orang

		Jumlah: 429 orang
5). Tingkat Pendidikan Kadus		Sarjana : ~ orang Diploma : ~ orang SLTA/ seder : 238 orang SLTP/ seder : 174 orang <u>Jumlah: 412 orang</u>
6). Jumlah Perangkat Desa (yg terisi)		Sekdes : 145 orang Kaur/Kasi : 860 orang Kadus : 447 orang <u>Jumlah:1.462 orang</u>
7). Aparat Desa yg belum terisi/kosong	Kepala Desa	: ~ orang
	Sekdes	: ~ orang
	Kaur/Kasi	: 10 orang
	Kadus	: 15 orang
	<u>Jumlah:</u>	15 orang
8). Tingkat Pendidikan Sekdes		Sarjana : ~ orang SLTA/Seder. : 145 orang SLTP/Seder. : ~ orang SD/Seder. : ~ orang <u>orang</u> Jumlah: 145 orang
<b>2. Badan Permusyawaratan Desa</b>		
1). Keanggotaan BPD yg terisi		Ketua : 145 orang Wakil : 145 orang Sekretaris : 145 orang Anggota :1.015 orang <u>Jumlah:1.450 orang</u>
2). Keanggotaan BPD yg blm terisi		Ketua : ~ orang Wakil : ~ orang Sekretaris : ~ orang Anggota : ~ orang <u>Jumlah: ~ orang</u>
3). Tingkat Pendidikan BPD :	Ketua	Sarjana : 24 orang SLTA : 52 orang SLTP : 69 orang <u>Jumlah: 145 orang</u>
	Wakil	Sarjana : 11 orang SLTA : 49 orang SLTP : 85 orang <u>Jumlah: 145 orang</u>
	Sekretaris	Sarjana : 8 orang SLTA : 59 orang SLTP : 88 orang <u>Jumlah: 145 orang</u>
	Anggota	Sarjana : 50 orang SLTA : 170 orang SLTP : 795 orang <u>Jumlah:1.015 orang</u>

**b. Sub 2 Indikator Kinerja 1 : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RAPBDes dan RRKDesa**

Kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dicapai dengan melakukan fasilitasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran tingkat desa, serta fasilitasi penyusunan Rincian Rencana Kegiatan Desa (RRKDes) yang merupakan rencana detail pelaksanaan anggaran desa. Kegiatan ini merupakan urusan yang wajib dilakukan setiap tahun untuk mengendalikan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tahun 2020 fasilitasi penyusunan RAPBDes dan RRKDes juga telah dilaksanakan bagi 145 desa (100%) dengan peserta terdiri dari Sekretaris Desa dan Operator Siskeudes.

**c. Sub 3 Indikator Kinerja 1: Jumlah Desa yang pengelolaan administrasinya baik.**

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa juga diukur dari kualitas administrasi desa. Telah banyak instrument yang telah diturunkan ke desa baik dalam bentuk buku, format dan regulasi tentang tata kelola administrasi desa. Jenis dan bentuk administrasi desa yang secara regular dibina ketersediaan dan penggunaannya terdiri dari:

- (1) Administrasi Umum terdiri dari:
  - (a) Buku data peraturan desa
  - (b) Buku data Keputusan Kepala Desa
  - (c) Buku data inventaris desa
  - (d) Buku data aparat pemerintah desa
  - (e) Buku tanah milik desa
  - (f) Buku data tanah di desa
  - (g) Buku agenda
  - (h) Buku ekspedisi.
- (2) Buku Administrasi Penduduk terdiri dari:
  - (a) Buku data induk penduduk
  - (b) Buku data mutasi penduduk
  - (c) Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan
  - (d) Buku data penduduk sementara.
- (3) Administrasi Keuangan Desa terdiri dari:
  - (a) Buku anggaran penerimaan
  - (b) Buku anggaran pengeluaran rutin
  - (c) Buku anggaran pengeluaran pembangunan
  - (d) Buku Kas Umum
  - (e) Buku Kas Pembantu Penerimaan
  - (f) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
  - (g) Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan

- (4) Administrasi Pembangunan terdiri dari:
  - (a) Buku Rencana Pembangunan
  - (b) Buku Kegiatan pembangunan
  - (c) Buku Inventaris Proyek
  - (d) Buku Kader-Kader Pembangunan
- (5) Administrasi BPD terdiri dari:
  - (a) Buku data anggota BPD
  - (b) Buku data keputusan BPD
  - (c) Buku data kegiatan BPD
  - (d) Buku agenda BPD
  - (e) Buku ekspedisi BPD
- (6) Administrasi lainnya terdiri dari:
  - (a) Buku Profile Desa
  - (b) Buku register penyelesaian kasus
  - (c) Buku data penduduk miskin
  - (d) Buku penerima rastra
  - (e) Buku data lembaga masyarakat desa
  - (f) Buku tamu
  - (g) Dan buku lainnya sesuai kebutuhan desa.

Pembinaan dalam bentuk bimtek pengisian buku administrasi bagi aparatur, pemeriksaan pengisian dan ketersediaan buku di desa telah dilakukan secara regular setiap tahun. Kelengkapan dan keteraturan pengisian buku administrasi oleh masing-masing aparat desa bervariasi.

#### ***B. SASARAN II: MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF***

Capaian kinerja sasaran ini merupakan kontribusi pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan dengan indikator sasaran :

- 1). Jumlah lembaga ekonomi yang dibentuk dan dibina;
- 2). Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina; dan
- 3). Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan dibina.

***Difasilitasi*** maksudnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Dinas PMD hanya sebagai fasilitator kegiatan, sedangkan pelaksananya adalah aparatur desa, pengurus bumdes dan kelompok masyarakat desa.

***Dibina*** maksudnya kegiatan tersebut telah dijalankan oleh aparatur desa, pengurus bumdes atau kelompok masyarakat namun tetap dalam bimbingan, monitoring dan evaluasi oleh Dinas PMD. Secara umum capaian indikator kinerja sasaran ini dipandang ***memuaskan*** karena dilaksanakan tuntas 91.04 % dengan desa yang difasilitasi dan dibina sebanyak 145 Desa sebagaimana ditampilkan dalam tabel capaian kinerja sebagai berikut:

**Evaluasi Pencapaian Sasaran: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016-2021	Tahun 2017-2019		Capaian Kinerja s/d Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
<b>1</b>	<b>Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina</b>	<b>Desa</b>	<b>145</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>94.25</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100</b>
1	Jumlah Bumdes yang dibentuk dan dibina	Bumdes	145	87	82	94.25	53	53	100
<b>2</b>	<b>Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina</b>	<b>Klpk</b>	<b>111</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>98.75</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100</b>
1	Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina	Klpk	100	40	39	97.5	20	20	105
2	Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata	UPK	11	11	11	100	11	11	100
<b>3</b>	<b>Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina</b>	<b>Unit</b>	<b>587</b>	<b>546</b>	<b>543</b>	<b>89.07</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>100</b>
1	Jumlah desa pembinaan pengelolaan dana desa	Desa	145	145	145	100	145	145	100
2	Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM	Desa	5	3	3	100	-	-	-
3	Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi	Klpk	184	184	184	100	184	184	100
4	Jumlah Desa yang dimekarkan	Desa	65	65	22	33.84	52	52	100
5	Jumlah pengurus Bumdes yang telah mendapat pelatihan	Desa	145	116	116	100	-	-	-
6	Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina	Desa	44	29	26	89.65	11	11	100
7	Jumlah posyandu juara lomba starata	Kec.	4	4	4	100	3	3	100
<b>Rata-rata</b>					<b>94.02</b>				<b>100</b>
<b>Katagori</b>					<b>Sangat Baik</b>				<b>Memuaskan</b>

**INDIKTOR 1 KINERJA SASARAN II : JUMLAH LEMBAGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA YANG DIFASILITASI DAN DIBINA**

Capaian kinerja sasaran ini merupakan kontribusi pelaksanaan 3 program dan 11 kegiatan dengan indikator sasaran:

- 1). Jumlah lembaga ekonomi yang dibentuk dan dibina;
- 2). Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dan dibina; dan
- 3). Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan dibina.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran ini dinilai **memuaskan** karena dilaksanakan 4tuntas dan target yang dicapai 91.04 % dengan desa yang difasilitasi dan dibina sebanyak 145 Desa.

Lebih lanjut capaian sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif dapat dijelaskan melalui capaian kinerja per kegiatan dalam sasaran tersebut sebagai berikut :

**a. Sub 1 Indikator 1 Kinerja Sasaran II: Jumlah Lembaga Ekonomi yang dibentuk dan dibina**

Lembaga ekonomi desa yang dibentuk dan dibina adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bidang Usahanya adalah bergerak di bidang jasa dan dagang, sehingga Sampai 2020 kinerja pembentukan Bumdes **Memuaskan** karena telah berhasil dibentuk 140 Bumdes baru, sehingga upaya ini mendongkrak capaian kinerja pada kegiatan ini mencapai 100%.

Pembinaan yang dilakukan Dinas PMD terhadap Bumdes mencakup aspek :

- 1). Regulasi pembentukan;
- 2). Kelayakan usaha;
- 3). Administrasi pengelolaan; dan
- 4). Pertanggungjawaban pengelolaan.

Jumlah BUMDES dan Penyertaan Modal dari Tahun 2016 – 2020 adalah sbb :

No	TAHUN	JUMLAH BUMDES	PENYERTAAN MODAL	SUMBER DANA
1	2016	20	-	
2	2017	43	2,624,627,608	APBN/DD
3	2018	22	11,984,928,481	APBN/DD
4	2019	30	2.239.528.265	APBN/DD
5	2020			APBN / DD
<b>TOTAL</b>				

**b. Sub 2 Indikator 1 Kinerja Sasaran II : Jumlah Kelompok Ekonomi Masyarakat Desa yang dibentuk dan diina**

- 1) **Pembinaan SPKP UPK PNPM** : Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif juga dilakukan melalui pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola usaha Ekonomi produktif dan bantuan permodalan usaha.

Kelompok ekonomi masyarakat yang saat ini dibina adalah kelompok ekonomi yang telah dibentuk sejak program PNPM diberlakukan. Operasionalisasi kelompok ini dibawah tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan. Sejak awal hingga saat ini terdapat 12 UPK di 12 Kecamatan yang mengelola pembiayaan usaha ekonomi produktif dan bantuan permodalan usaha kelompok masyarakat.

Perkembangan kinerja UPK dalam mengelola dana PNPM tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut:

DATA PERKEMBANGAN MODAL USAHA SPKP UPK PNPM TAHUN 2019 dan 2020

No	Nama Kecamatan	Jlh Desa / Kel	TAHUN 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	Keterangan
			Total Dana Perguliran	Perkiraan Nilai Aset Lain	Total Dana Perguliran	Perkiraan Nilai Aset Lain		
			Rp	Rp	Rp	Rp		
1	Cibal	17	7.076.000.296	35.324.350	7.467.234.158	35.324.350	Dilaporkan setelah pelaksanaan MAD Bulan Februari 2021	Aset-aset lain:
2	Rahong Utara	12	4.596.519.245		4.695.256.579			antara lain:
3	Langke Rembog	20	2.167.433.528	30.022.222	2.316.519.078	3.677.778		- Tanah
4	Ruteng	19	10.419.492.108	96.930.985	11.197.844.727	-		- Gedung
5	Wae Rii	16	3.697.274.072	726.074.979	3.540.108.351	-		-Inventaris
6	Reok	10	4.375.315.166	18.923.000	3.510.606.370	18.562.634		(Motor, Laptop, dll)
7	Reok Barat	10	334.885.000	-	334.885.000	-		
8	Satar Mese	21	2.657.291.601	62.573.000	2.657.291.601	62.573.000		
9	Satar Mese Barat	20	5.734.917.186	40.609.000	6.120.349.601	5.808.333		
10	Lelak	10	5.187.306.679	79.303.000	5.205.015.344	10.200.000		
11	Cibal Barat	10	357.450.035	23.359.088	1.610.769.515	12.059.733		
<b>Total</b>			<b>46.603.884.916</b>	<b>447.021,355</b>	<b>48.655.880.584</b>	<b>148.205.828</b>		

- 2) **Pembinaan Pokjantal Posyandu.** Pembinaan untuk menunjang perekonomian desa juga dilakukan melalui penggerakan kelompok dan kader pokjantal posyandu di tingkat desa yang berjumlah 20 kelompok di tahun 2020. Pembinaan terhadap Pokjantal Posyandu dipandang perlu terus menerus dilakukan karena disamping banyak perubahan kader dalam kelompok juga untuk memotivasi kader berperan aktif sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang kesehatan.

DATA PEMBINAAN POKJANTAL POSYANDU TAHUN 2020

NO	KEC	DESA		ASPEK PEMBINAAN
1	Ruteng	1	Compang Dalo	1 Regulasi Desa (SK Pokjantal)
		2	Cumbi	2 Fasilitasi Pembentukan Pokjantal Desa dan
2	Satar Mese Utara	3	Popo	unit pengelola posyandu desa
		4	Mata wae	3 Penguatan kelembagaan Pokjantal Posyandu
3	Satar Mese Barat	5	Wongka	4 Penyusunan Rencana kegiatan pokjantal posyandu
		6	Cambir Leca	5 Pembinaan administrasi pokjantal dan
4	Cibal Barat	7	Latung	unit pengelola posyandu desa
		8	Golo Woi	
5	Satar Mese	9	Satar Loung	
		10	Jaong	
		11	Golo Lambo	
		12	Langgo	
		13	Tado	
		14	Lungar	
		15	Mocok	
		16	Golo Muntas	

		17	Ulu Belang	
		18	Gara	
6	Reok Barat	19	Robek	
		20	Ruis	

*c. Sub 3 Indikator Kinerja II: Jumlah Desa dan Lembaga Masyarakat Desa yang dibentuk dan dibina*

1. **Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa.** Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif juga tergambar melalui transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Pembinaan dilakukan mencakup aspek perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan Inspektorat Kabupaten.

Pembinaan pengelolaan keuangan desa pada aspek perencanaan meliputi :

- 1). Ketepatan waktu pelaksanaan musyawarah dusun dan desa;
- 2). Penyusunan RKPDes;
- 3). Penyusunan RAPBDes;
- 4). Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
- 5). Bimbingan teknis pengoperasian Aplikasi Siskeudes;
- 6). Regulasi anggaran desa.

Capaian kinerja pembinaan pada aspek perencanaan desa telah dilakukan terhadap 145 desa. Seluruh 145 desa telah melaksanakan perencanaan dan melaporkan ketersediaan dokumen perencanaan.

walaupun dari segi ketepatan waktu masih banyak desa yang terlambat dalam waktu pelaksanaan.

Capaian kinerja pembinaan pada aspek pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan terhadap 145 desa.

Pembinaan mencakup 2 hal yaitu ketepatan waktu pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Dalam aspek ini tidak semua desa melakukan pertanggungjawaban tepat waktu dan masih ditemukan ketidaklengkapan dokumen SPJ kegiatan desa.

Berdasarkan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyaluran dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat disimpulkan semua desa terlambat memperoleh penyaluran dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa karena belum memenuhi syarat penyaluran antara lain: 1). Perdes APBDes; 2). Laporan Realisasi belanja; dan 3). Kelengkapan SPJ keuangan atau dapat kami gambarkan melalui tabel dibawah ini :

**Tabel Pengelolaan ADD Tahun 2020 :**

No	Uraian	Jumlah Desa
1.	Penyampaian Laporan Realisasi Tidak Tepat Waktu	82
2.	Penyampaian SPJ Tidak Lengkap	-
3.	Perbaikan SPJ	20
4.	SPJ/Laporan Realisasi yang Lengkap	-
<b>Total</b>		<b>102</b>

2. **Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).** Untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2020 tidak terlaksana. Dikarenakan dana tersebut dirasionalisasi.

**Tabel Lokasi Pencanangan BBGRM :**

No	Lokasi Desa/Kecamatan	Jumlah Desa	Tahun
1.	Kajong/Reok Barat	1	2016
2.	Bangka Ajang/Rahong Utara	1	2017
3.	Golo Lanak/Cibal Barat	1	2018
4.	Watu Tango / Reok	1	2019
5.	-	-	2020

3. **Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga.** Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif juga melalui upaya pelibatan keluarga dalam pembangunan yang dimotori oleh TP-PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa sebanyak 184 kelompok. Tahun 2020 jumlah PKK aktif adalah sebagai berikut :

- 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten
- 12 Tim penggerak PKK Kecamatan
- 26 Tim penggerak PKK Kelurahan
- 145 Tim penggerak PKK Desa

Upaya pemberdayaan keluarga dimulai dari upaya Penguatan Kelembagaan PKK melalui rapat evaluasi dan rapat konsultasi. Sedangkan upaya langsung pemberdayaan keluarga dilakukan melalui pelaksanaan Jambore Kader PKK, Sosialisasi, Pelatihan Bina Keluarga Balita, Pelatihan UP2K, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Sandang, Pengelolaan Pangan local, Gerakan Halaman Asri, Pemanfaatan Bahan Tenun, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Kader Pembantu Bumil, Pelatihan Kader PHBS, Sosialisasi Pencegahan Penyakit. Pembinaan yang dilakukan DPMD terhadap pemberdayaan keluarga hanya pada aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sedangkan seluruh operasional kegiatan dilimpahkan ke TP-PKK Kabupaten.

4. **Penataan Desa.** Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif terlihat dari peran aktif masyarakat dalam aktifitas penataan desa. Tahun 2020, kegiatan penataan desa difokuskan pada upaya masyarakat dalam mengusulkan pemekaran desa.

1. **Tahun 2019** Dinas PMD Kabupaten Manggarai melakukan sosialisasi kepada 145 BPD dan Kepala Desa di 11 kecamatan. Hasil sosialisasi telah direspon oleh 26 Desa dengan mengajukan proposal pemekaran

dan ditindaklanjuti oleh DPMD dengan melakukan Verifikasi terhadap proposal yang disampaikan dengan mengecek dokumen proposal dengan kondisi riil di lapangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten.

**DATA NAMA DESA YANG MENGAJUKAN PROPOSAL PEMEKARAN  
DESA  
TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		KETERANGAN
		INDUK	CALON DESA PERSIAPAN	
1	Satar Mese	1	Wewo	Bangka Gonggor
		2	Koak	Ulu Koak
		3	Wae Ajang	Kaca
		4	Paka	Satar Loleng
		5	Tal	Nanga Woja
		6	Langgo	Watu Lajar
		7	Legu	Bangka Redeng
		8	Moco, Lungar, Golo Muntas	Pong Meleng
2	Satar Mese Utara	9	Nao	Compang wotol
		10	Kole	Ndajang
		11	Lia	Compang Repok
3	Ruteng	12	Meler	Pong Ndung
		13	Beo Rahong	Golo Cumang
		14	Benteng Kuwu	Benteng Wake
4	Cibal	15	Riung	Bangka Gumbang
		16	Golo	Golo Roco
5	Rahong Utara	17	Liang Bua	Mbau Langke
6	Lelak	18	Ketang	Ra'ong
		19	Lentang	Watu Weru
7	Wae Rii	20	Wae Mulu	Bangka Nderu
		21	Bangka Kenda	Compang Kaweng
		22	Golo Watu	Compang Ru'a
		23	Sambi	Pasat
8	Reok Barat	24	Kajong	(usulan mekar 3 Desa)
		25	Satar Lenda	Denge
9	Satar Mese Barat	26	Satar Ruwuk	Pasir Putih
		27	Hilihintir	Hilihintir Selatan dan Muku Te'e (Usulan mekar 2 Desa)
		28	Wae Renca	Bea Denger
10	Cibal Barat	29	Lenda	Madona
		<b>TOTAL</b>		29 Desa

**DATA NAMA DESA PERSIAPAN YANG SUDAH DIRESMIKAN TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		NAMA IBU KOTA DESA PERSIAPAN
		INDUK	PERSIAPAN	
1	Satar Mese	1 Pongkor	Ulungali	Ulungali
2	Ruteng	2 Bulan	Bung	Lando
		3 Golo Worok	Bangka Wela	Wela
3	Cibal	4 Ladur	Liang Tongkeng	Wancang
		5 Welu	Lura	Lujang
		6 Nenu	Benteng Todo	Haor
4	Rahong Utara	7 Golo Langkok	Golo Wangko	Wangko
		8 Buar	Compang Ntala	Ntala
		9 Pong Lengor	Bangka Putuk	Galang
		10 Tengku Lese	Cunca Lega	Rongges Rowe
5	Lelak	11 Bangka Lelak	Wae Nanga	Mbohang
		12 Urang	Redo	Redo
6	Wae Rii	13 Golo Cador	Golo Ling	Ling
		14 Wae Rii	Bangka Wade	Lingko Nunang
7	Reok Barat	15 Ruis	Ruis Timur	Wae Belang
		16 Loce	Benteng Loce	Tagol
8	Satarmese Barat	17 Satar Luju	Luju Mas	Watu Dali
		18 Terong	Bea Terong	Lokom
		19 Cambir Leca	Lereng	Reda
9	Cibal Barat	20 Bere	Compang Bere	Roho
		21 Wae Codi	Golo Taas	Cekok
		22 Timbu	Lada	Timbu
<b>TOTAL</b>		<b>22 Desa</b>		

5. ***Penguatan Kapasitas Lembaga Adat.*** Capaian kinerja keberdayaan masyarakat yang partisipatif dilakukan dengan mendorong peran lembaga adat yang ada di setiap desa. Peran lembaga adat dengan kearifan lokal mereka masih relevan menjawab persoalan praktis kehidupan masyarakat desa. Guna mengoptimalkan peran lembaga adat desa, DPMD telah memfasilitasi pembentukan 11 lembaga adat di desa sebagai berikut:

## DATA SOSIALISASI PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA/KEL
1	Ruteng	Pong Lale
		Benteng Kuwu
2	Wae Rii	Compang Ndehes
		Poco
		Bangka Jong
		Golo Cador
3	Cibal	Gapong
		Kentol
4	Satar Mese Utara	Popo
		Mata Wae
5	Reok	Bajak

6. **Lomba Strata Posyandu.** Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan juga terlihat dari peran lembaga di desa dalam bidang kesehatan yang dimotori oleh Posyandu Desa. Kualitas partisipasi lembaga desa tersebut diukur dari kemampuan mereka dalam menggerakkan masyarakat menjalankan pola hidup bersih dan sehat, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan berkala, serta kerjasama antar jejaring kesehatan. Kesuksesan lembaga tersebut bervariasi diberbagai desa. Guna mengapresiasi prestasi yang telah dikerjakan pada 145 desa maka dibuatlah lomba antar berbagai posyandu tersebut dengan cara mengevaluasi kinerja setiap posyandu dan menjaring desa pengelola posyandu terbaik untuk ditetapkan sebagai juara menurut masing-masing strata posyandu. Tahun 2020, desa juara berdasarkan strata posyandu adalah sebagai berikut:

### DATA DESA JUARA LOMBA STRATA POSYANDU TAHUN 2020

NO	TINGKATAN STRATA	POSYANDU JUARA	DESA/KEL	KECAMATAN
1	Madya	Jaong	Nao	Satar Mese Utara
2	Purnama	Wewo	Wewo	Satar Mese
3	Mandiri	Ponggeok	Ponggeok	Satar Mese

#### A. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN

1. **Keberhasilan:** Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas PMD antara lain:
  - a. Ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan;
  - b. Kesiapan aparatur pelaksana tugas; dan
  - c. Kesadaran dari semua pihak pelaksana program dan kegiatan.
2. **Hambatan:** berkaitan dengan tidak dilaksanakannya 4 ( empat ) kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun yaitu :
  - 1) Pengadaan Mebeluer

- 2) Pengadaan genzet
- 3) Rapat evaluasi/rapat kerja dengan perangkat desa; dan
- 4) Bulan Bakti Gotong Royong
- 5) Pilkades

Kegiatan ini batal dilaksanakan karena terjadi rasionalisasi anggaran Pemerintah Daerah. Hambatan lain yang dihadapi Dinas PMD dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.

***Faktor Eksternal:***

Kinerja Pemerintah Desa belum optimal dari aspek kerjasama, pengembangan pengetahuan, ketaatan pada aturan, serta tertib administrasi menyebabkan keterlambatan dalam perencanaan, laporan pertanggungjawaban, serta temuan penyimpangan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

***Faktor Internal:***

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan belum optimal;
  - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan direncanakan kurang terintegrasi sehingga terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan dipertengahan dan akhir tahun.
  - c. Terdapat 2 ( dua ) jabatan yang lowong pada Dinas PMD karena pensiun dan meninggal dunia, belum ada pengganti.
- 1) **Upaya mengatasi hambatan.** Hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas PMD yang dipengaruhi faktor eksternal diatasi dengan cara:
- a. Melakukan Bimtek bagi Aparatur dalam Bidang Manajemen Pemerintahan.
  - b. Melakukan Pelatihan-Pelatihan khusus bagi pelaksana program dan kegiatan.
  - c. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
  - d. Mengintegrasikan penyusunan rencana pembinaan desa.
  - e. Menugaskan staf yang memenuhi syarat oleh kepala dinas untuk melaksanakan tugas pejabat struktur yang lowong.

**B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Kondisi 31 Desember 2020, jumlah Pegawai pada Dinas PMD sebanyak 24 orang PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak Daerah. Sehingga diperlukan tambahan tenaga staf sebanyak 6 orang lagi untuk menggantikan pegawai yang pensiun.

Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk membiayai sejumlah sasaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kab. Manggarai adalah :

Rp.1.292.425.700.- dengan anggaran per Sasaran Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sasaran I.....	= Rp. 418.353.500.-
2. Sasaran II.....	= <u>Rp. 759.575.140.-</u>
Total.....	= Rp. 1.292.425.700.-

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 1.586.199.471,- dengan rincian sbb :

Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan DPMD pada Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam tabel dibawah ini :

## Realisasi Belanja Langsung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkat nya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1	<b>Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina:</b>	<b>Program peningkatan kapasitas Aparatur Desa</b>			
		1	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan Ketua BPD	1 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Ketua BPD	10.378.000	8.278.000	79.76
		2	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKP Desa	2 Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	24.649.000	24.499.000	99.39
		3	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan APBDes dan RRK Desa	3 Fasilitasi Penyusunan APBDes dan RRKDesa	65.169.000	65.019.000	99.77
		2	Jumlah Ranperda yang diusulkan	4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)	-	-	-
		3	Jumlah desa yang pengelolaan administrasinya baik	5 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	236.802.000	222.303.800	93.88
		4	Jumlah Pelantikan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa dan BPD	6 Pelantikan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa dan BPD	750.000	750.000	100
		5	Jumlah Satker Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa	7 Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa	90.695.700	90.545.700	99.83
<b>TOTAL I</b>				<b>427.693.700</b>	<b>410.645.500</b>	<b>96.01</b>	
2	Meningkat nya Keberdayaan Masyarakat yang partisipatif	1	<b>Jumlah Lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk dan dibina</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa</b>			
		1	Jumlah Bumdes yang dibentuk dan dibina	1 Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	91.085.700	90.485.700	99.34
		2	<b>Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina:</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>			
		1	Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina	1 Operasional sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten	58.138.000	58.138.000	100
		2	Jumlah UPK kelompok SPKP yang dibina dan jumlah aset kelompok yang ditata	2 Penataan dan validasi kelompok SPKP dan Aset PNPM NFD dan MP3KI	60.454.000	60.454.000	100
		3	<b>Jumlah desa dan lembaga masyarakat desa yang difasilitasi dan dibina:</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa</b>			
		1	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan dana desa	1 Pembinaan dan Administrasi Proyek ( PAP) PNPM Oo	156.916.500	156.536.040	99.76
		2	Desa yang ditetapkan untuk peringatan BBGRM	2 Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	-	-	-
		3	Jumlah kelompok PKK yang dibina dan difasilitasi	3 Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	155.839.000	94.072.800	60.37
		4	Jumlah Desa yang dimekarkan	4 Penataan Desa (Pemekaran Desa)	271.678.000	219.927.600	80.95
6	Jumlah lembaga adat yang difasilitasi dan dibina	6 Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa	47.741.000	47.741.000	100		
7	Jumlah posyandu juara lomba starata	7 Lomba Strata Posyandu	32.220.000	32.220.000	100		
<b>TOTAL II</b>				<b>874.072.200</b>	<b>759.575.140</b>	<b>86.90</b>	
<b>TOTAL I + II</b>				<b>1.301.765.900.-</b>	<b>1.170.220.640.-</b>	<b>91.45</b>	

## BAB IV PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai merupakan Instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi DPMD Kab. Manggarai sekaligus Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Secara ringkas seluruh capaian kinerja 2 (dua) sasaran dan 4 indikator kinerja telah memerikan gambaran yang sangat berarti untuk terus meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari 4 Program dan 26 Kegiatan tersebut yaitu Realisasi Keuangan **97.08 %** dan Realisasi Fisik **97.08 %**. Kondisi ini menunjukkan bahwa DPMD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Disamping keberhasilan yang telah diperoleh, masih sangat dibutuhkan perbaikan-perbaikan dan pembenahan khususnya pada realisasi keuangan dan fisik yang belum mencapai 100% serta keterlambatan dalam pertanggungjawaban.

Dalam keterbatasan sumber daya aparatur, pembiayaan dan peralatan serta perlengkapan kerja yang ada pada DPMD Kabupaten Manggarai, maka segala keberhasilan yang dicapai merupakan hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan atas 4 Program dan 26 Kegiatan dalam 2 Sasaran dan 4 Indikator Kinerja Sasaran diharapkan tidak mengurangi makna pertanggungjawaban yang meliputi aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021 ini disampaikan untuk maklum dan urusan selanjutnya.

Terima Kasih.

Ruteng, 30 Januari 2022

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN MANGGARAI,

  
**DRS. YOSEPH TEHALUT**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 196510281994021002